



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT BKPK TAHUN 2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024**



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT BKPK TAHUN 2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan turunan dari dokumen perencanaan kinerja 5 (lima) tahunan (Renstra dan Rencana Aksi Program (RAP), serta penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT Sekretariat BKPK Tahun 2024 memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai BKPK pada tahun 2024 serta anggaran yang dialokasikan. Dokumen RKT diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT Sekretariat BKPK Tahun 2024.

Jakarta, April 2024

Sekretaris BKPK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Etik Retno Wiyati'.

dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	7
A.	LATAR BELAKANG.....	7
B.	MAKSUD DAN TUJUAN	8
C.	ORGANISASI	8
BAB II	EVALUASI KINERJA TAHUN 2023	19
A.	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	19
B.	HAMBATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2023	20
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	25
A.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024	25
B.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024	26
C.	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024.....	27
D.	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	30
BAB IV	PENUTUP.....	35
LAMPIRAN I		
LAMPIRAN II		
DAFTAR KONTRIBUTOR		

DAFTAR TABEL

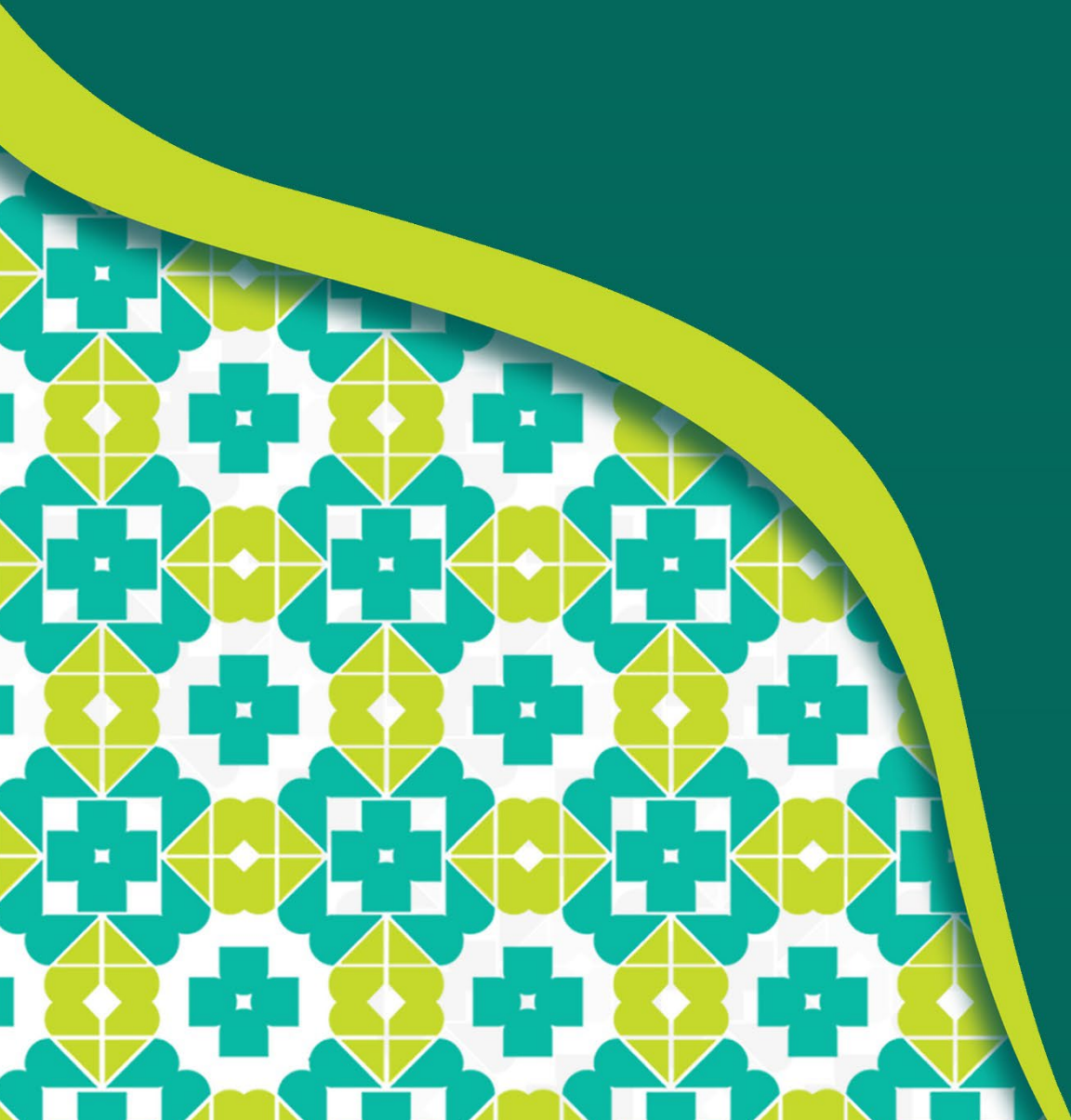
Tabel I.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	12
Tabel II.1 Target dan Capaian IKP Sekretariat BKPK Tahun 2023.....	19
Tabel III.1 Indikator Sasaran Strategis BKPK Tahun 2024	25
Tabel III.2 Indikator Kinerja Program Sekretariat BKPK Tahun 2024.....	27
Tabel III.3 Indikator Kinerja Kegiatan BKPK Tahun 2024	29
Tabel III.4 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK 9

BAB I.

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT dibuat dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Renja K/L. Dalam perencanaan kinerja tersebut, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Keterkaitan RKT dengan Renja-KL harus tercermin pada penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga indikator kinerja, target dan rencana alokasi anggaran tahun anggaran berjalan. Alokasi anggaran dalam RKT sebagai sebuah tahapan perencanaan kinerja dan penganggaran, RKT dan Renja-KL menjadi dokumen yang dapat saling melengkapi dari sisi penjabaran kegiatan dan usulan alokasi anggarannya. Dalam kaitan ini, RKT melengkapi secara rinci menuangkan perencanaan anggaran yang tercermin dalam dokumen Renja-KL.

RKT Sekretariat BKPK Tahun 2024 memuat sasaran kinerja, program kinerja, indikator kinerja, target kinerja periodik, kegiatan/aktivitas dan rincian anggaran Sekretariat BKPK tahun 2024. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan

penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, Dokumen RKT dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja pada BKPK.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKPK Tahun 2024, dan
3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan dokumen RKT diharapkan memberikan gambaran keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

C. ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

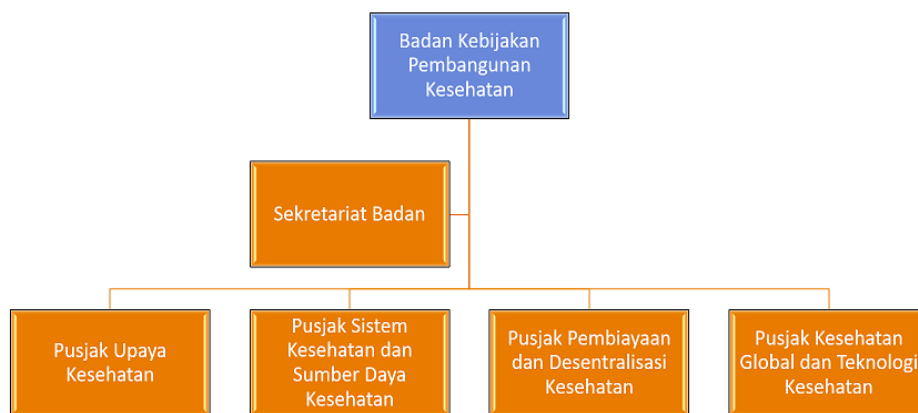
Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;

- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.



Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK

Ruang lingkup kebijakan BKPK dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Pusjak yang menyesuaikan dengan enam pilar transformasi kesehatan dan penugasan terkait dari Menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Sekretariat BKPK

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan

2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

- Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis, dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

- Studi dan riset bidang kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1160/2022 tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Sebagai Pelaksana Studi dan Riset Bidang Kesehatan)
3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan.
4. Pusat Kebijakan Pembiayaan & Desentralisasi Kesehatan
- Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, serta evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan.
 - Kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi)
5. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan
 - Kerja sama luar negeri (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi)

2. Visi dan Misi

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin

sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yakni “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”.

Visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, serta (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam aspek pembangunan SDM sebagai modal manusia (*human capital*).

Selain itu, Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden itu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja
2. Perbaiki gizi masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Germas
5. Memperkuat sistem kesehatan

3. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
- 3) Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
- 4) Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan
- 5) Terpenuhinya sdm kesehatan yang kompeten dan berkeadilan
- 6) Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel I.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga

Tujuan		Sasaran Strategis	
	Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
5. Revolusi Mental Menuju *Smart* ASN.

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah Kebijakan BKPK

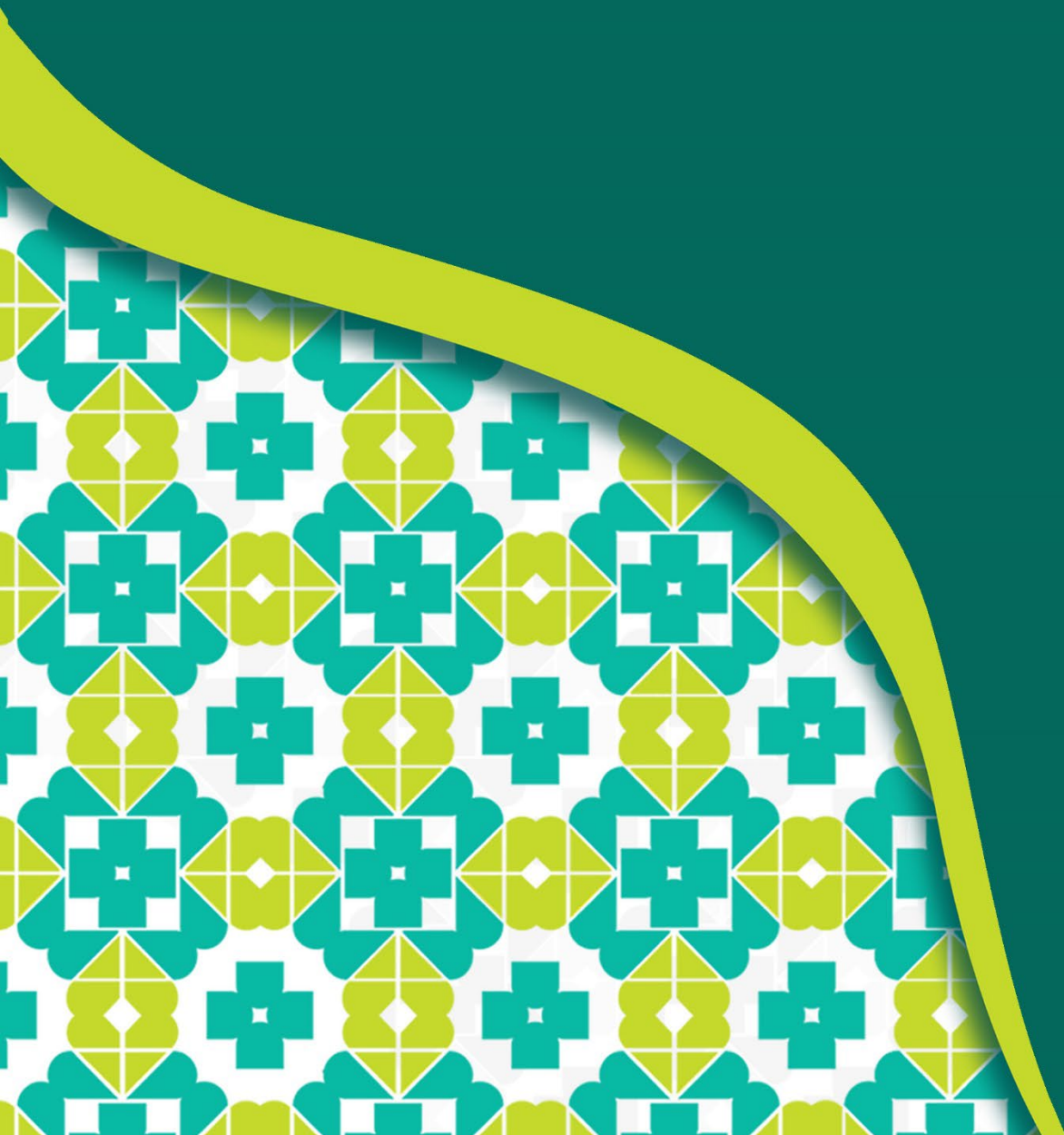
1. Kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti
2. Kebijakan pembangunan kesehatan yang mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, lintas K/L dan pemerintah daerah
3. Harmonisasi kebijakan pembangunan kesehatan internal Kementerian Kesehatan, antar K/L, dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan

Strategi BKPK

1. Mengembangkan lanskap kebijakan
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan mengacu kepada RPJMN, Renstra, dan sasaran prioritas pembangunan kesehatan
3. Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti
4. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan
5. Melaksanakan integrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan kesehatan di pusat dan daerah
6. Evaluasi kebijakan pembangunan kesehatan

BAB II.

EVALUASI KINERJA TAHUN 2023



BAB II. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Hal ini berdampak juga pada perubahan tugas dan fungsi organisasi, yang berakibat pada perubahan program dan kegiatan secara menyeluruh.

Sesuai Dokumen Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2022-2024, Sekretariat BKPK melaksanakan dua program, yaitu:

1. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan sasaran meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program yaitu a) persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien, b) persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti, dan c) terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektif.
2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi dan nilai kinerja anggaran.

Penetapan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan ukuran keberhasilan kerja yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja IKP Sekretariat BKPK tahun 2023 secara umum dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.1 Target dan Capaian IKP Sekretariat BKPK Tahun 2023

Sasaran Program	IKP	2023		
		Target	Capaian	%
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	48,83	>120
Program Dukungan Manajemen				

Sasaran Program	IKP	2023		
		Target	Capaian	%
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi	85	89,50	105,29
	Nilai Kinerja Anggaran	93	94,30	101,40

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil penilaian kinerja Indikator Kegiatan Program (IKP) Sekretariat BKPK tahun 2023 memiliki tiga indikator yang terdiri atas indikator dari Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan yaitu pertama, Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti tidak tercapai sesuai target, capaian 9,67 (48,35%). Dua indikator dari program dukungan manajemen hasilnya merupakan capaian output bersama (Seluruh Kementerian Kesehatan) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 87.50 (93,08%) dan Indikator Nilai Kinerja Anggaran 95,53 (106,14%).

B. HAMBATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2023

Hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Sekretariat BKPK dalam mencapai target indikator program tahun 2023 serta rekomendasi solusi yang diberikan sebagai berikut:

1. Persentase Kebijakan Kementerian Kesehatan Berbasis Kajian dan Bukti

Faktor Penghambat Pencapaian Output

- a. Transformasi/perubahan organisasi Badan Litbangkes ke BKPK pada tahun 2022 efektif berjalan pada pertengahan tahun (bulan Juli-Desember) menyesuaikan dengan perubahan Renstra Kemenkes di tahun 2022
- b. Arahan pimpinan terhadap konsekuensi adanya transformasi/perubahan organisasi belum mencakup di seluruh lingkungan Kementerian

Kemenkes, perubahan baru berdampak di internal BKPK. Sementara perubahan IKK-IKP BKPK mencakup Kementerian Kesehatan.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

- a. Penguatan koordinasi di internal BKPK termasuk dengan seluruh Pusat Kebijakan, terutama terhadap perubahan renstra yang berdampak pada perubahan IKK-IKP BKPK, dimana peran Pusat Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU menjadi tusi utama.
- b. Berkontribusi memberikan masukan pada penyusunan Surat Edaran SOP Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung terlaksananya tusi utama BKPK untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang menjadi *evidence-based* setiap penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Masukan BKPK terhadap substansi SE SOP, yaitu menambahkan alur mekanisme penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang meliputi:
 - a) Pembahasan konsep peraturan oleh unit teknis pengusul bersama dengan pakar, pemangku kepentingan, dan lintas unit.
 - b) Kajian/analisis pentingnya dikeluarkannya peraturan yang dikoordinasikan oleh BKPK. Dalam penyusunan kajian/analisis tersebut, BKPK melibatkan unit pemrakarsa, lintas unit terkait, pakar dan pemangku kepentingan terkait;
 - c) Jika memerlukan izin prakarsa, maka penyiapan analisis untuk pendukung surat izin prakarsa diproses pada tahap ini.
 - d) Dalam penyiapan naskah analisis, disertai dengan *benchmarking* aturan dengan *minimal guideline WHO/guideline* internasional lainnya dan/atau 2 (dua) negara lain, sesuai dengan kebutuhan.
 - e) Penyiapan naskah analisis yang akan digunakan perancang untuk melakukan penyaringan/uji kelayakan peraturan.

2. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Permasalahan yang terjadi adalah perubahan *road map* RB nasional sesuai Kemenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 sehingga perlu perubahan *road map* RB Kemenkes, Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik masih dalam proses pembahasan dengan Kemenpan RB.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tidak lanjut yang akan dilakukan adalah sedang disusun *road map* RB Kementerian Kesehatan dan melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

3. Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Faktor Penghambat Pencapaian Target

- a. Penginputan untuk level RO dilakukan di aplikasi SAKTI modul komitmen sehingga terdapat perbedaan dalam mekanisme penginputan capaian *output* antara penanggung jawab monev dengan operator SAKTI modul komitmen
- b. Kurangnya monitoring dan sinkronisasi dalam proses penginputan sehingga terjadi revisi/perbaikan capaian *output* di aplikasi SAKTI modul komitmen

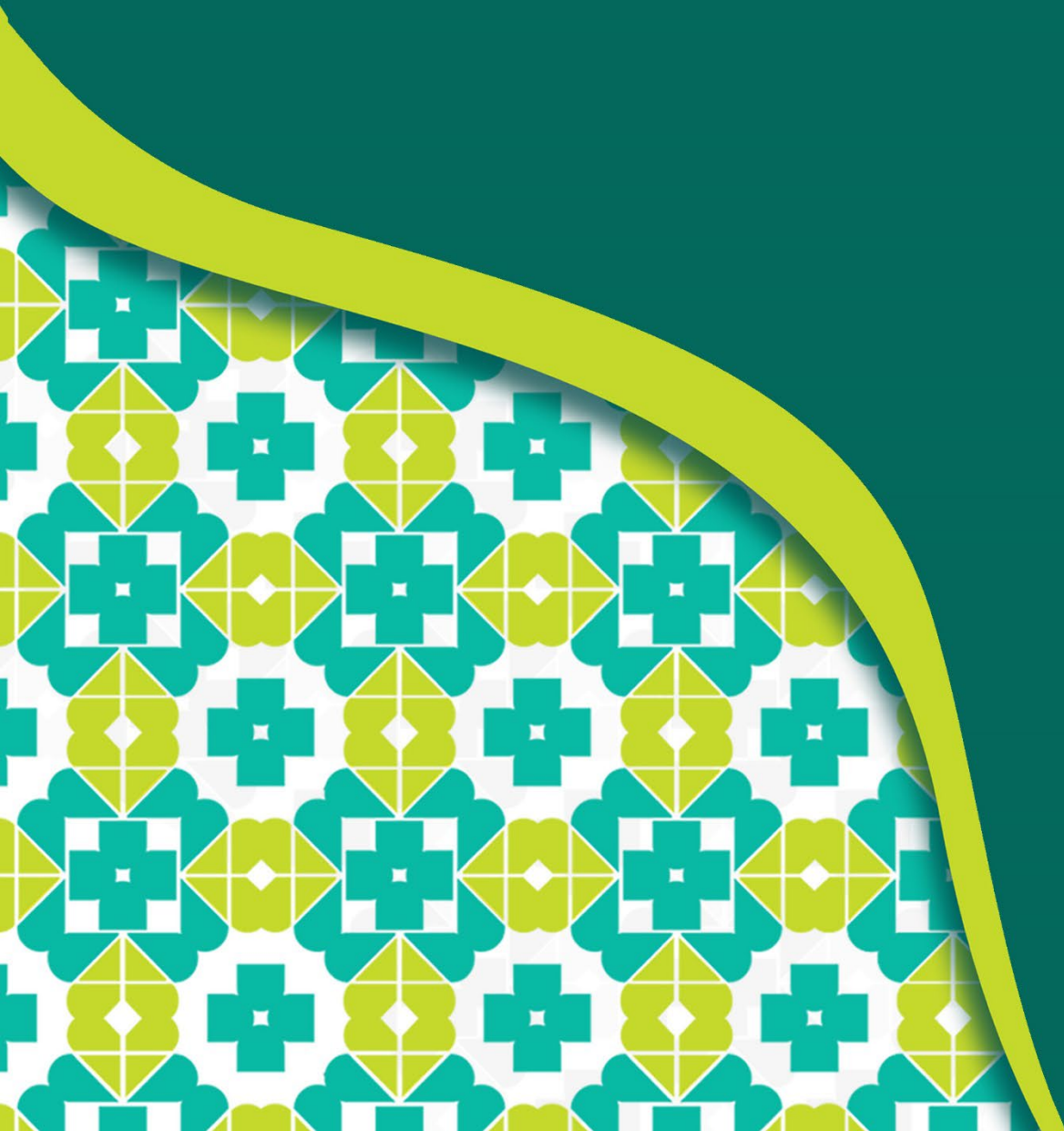
Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan menyamakan persepsi dalam penginputan, melakukan koordinasi dengan operator SAKTI sebelum penginputan, monitoring data di aplikasi SMART DJA setelah dilakukan penginputan di SAKTI serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Roren dan DJA.

BAB III.

RENCANA KINERJA

TAHUN 2024



BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

Rencana kinerja BKPK tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat enam tujuan dan 15 sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. BKPK mendukung tujuan ke-4, yaitu terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan, pada sasaran strategis ke-10, yakni terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif; sasaran strategis ke-11, yakni menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien, dan berkeadilan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC); tujuan ke 6, yakni terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif; serta sasaran strategis ke-16, yakni meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti yang diampu oleh Sekretariat BKPK. Indikator sasaran strategis BKPK tahun 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel III.1 Indikator Sasaran Strategis BKPK Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Unit Pengampu Utama
6.	Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif			
	6.2. Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	81	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

Sasaran strategis kemudian diturunkan menjadi sasaran program dan indikator kinerja program. Sekretariat BKPK sebagai unsur pendukung di Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Sesuai dokumen Renstra Revisi Tahun 2022-2024, Sekretariat BKPK melaksanakan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) yang dirinci sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
 - b. Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
 - c. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
 - d. Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektifProgram ini akan diturunkan untuk menggambarkan kontribusi kinerja masing-masing Eselon 2 di lingkungan BKPK (*crosscutting*) terkait pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan yang tercantum pada IKK masing-masing Pusjak di BKPK
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Nilai reformasi birokrasi
 - b. Nilai kinerja anggaran

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan definisi operasional yang tercantum pada dokumen Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 (revisi), yaitu hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan. Program ini akan diturunkan untuk menggambarkan kontribusi kinerja masing-masing Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan (*crosscutting*).

Tabel III.2 Indikator Kinerja Program Sekretariat BKPK Tahun 2024

No.	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	PJ
1.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	100	Sekretariat BKPK
2.	Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	a. Nilai Reformasi Birokrasi	98	Sekjen
		b. Nilai Kinerja Anggaran	95	Sekjen

C. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

Sesuai dokumen Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2020-2024, Sekretariat BKPK melaksanakan satu dari 3 Sasaran Strategis BKPK, yaitu: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Disamping itu BKPK juga mendukung pencapaian satu sasaran strategis yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu 1) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik, ini merupakan dukungan BKPK, sekaligus menggambarkan *crosscutting* terhadap Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran lingkup Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Untuk menjamin tercapainya Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Rencana Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat BKPK menggambarkan turunan dari sasaran strategis hingga sasaran kegiatan Sekretariat BKPK tahun 2024 yang dirinci sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
 1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

2. Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Program: Meningkatkan kebijakan kesehatan berbasis bukti

IKP:

- 1) Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
- 2) Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
- 3) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
- 4) Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif

3. Kegiatan:

- 1) Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

Sasaran kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

Pelaksana: Sekretariat BKPK

Indikator:

- 1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman.

b. Sasaran Strategis: Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik

1. Indikator Sasaran Strategis: Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

2. Program: Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

IKP:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai Kinerja Anggaran

3. Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pelaksana: Sekretariat BKPK

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Tabel III.3 Indikator Kinerja Kegiatan BKPK Tahun 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
V	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan				Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	A	Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti			Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
		1 Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti		100	
1	Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan				Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	a	Sasaran kegiatan Meningkatkan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Pusat		
		1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman *(V.A.2)		100	
VI	Program Dukungan Manajemen				Seluruh Unit Utama/Eselon 1
	B	Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan			Sekretariat Jenderal
		1 Nilai Reformasi Birokrasi		98	
		2 Nilai Kinerja Anggaran		95	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
19	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	a	Pusat		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			
	1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan *(VI.B.1)		36,1	
	2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan *(VI.B.2)		91	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

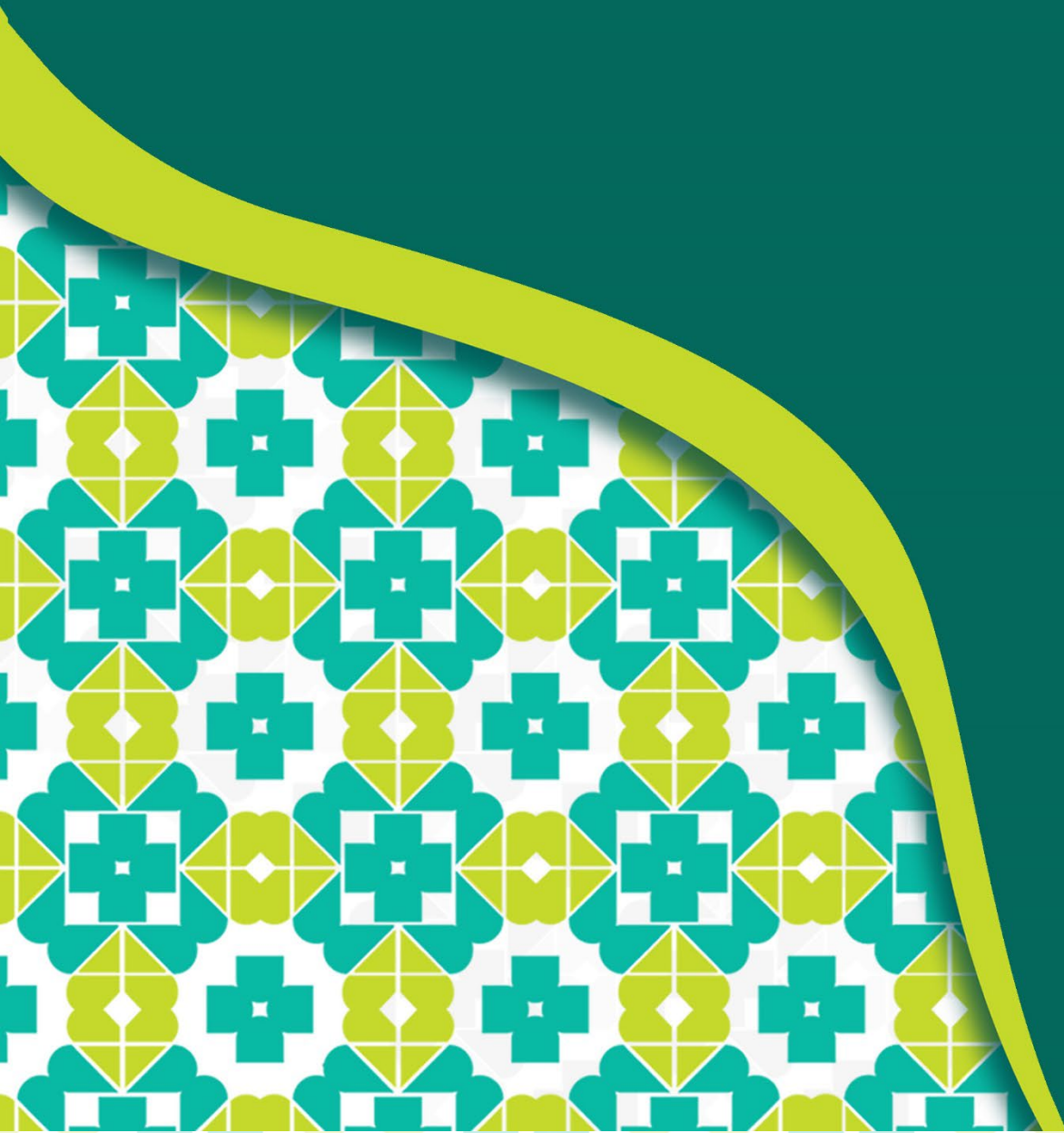
Anggaran BKPK yang disetujui tahun 2024 sebesar Rp 462.942.252.000,- (empat ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anggaran Sekretariat BKPK yang disetujui pada program Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp 17.254.927.000,- dan pada program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 82.476.909.000,- dengan rincian pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel III.4 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (ribuan)
I.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	19.268.200
1.	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	19.268.200
II.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	361.197.143
1.	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	255.892.759

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (ribuan)
2.	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	17.705.800
3.	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	9.104.707
4.	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	61.238.950
5.	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	17.254.927
III.	Program Dukungan Manajemen	82.476.909
1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	82.476.909
Total Anggaran		462.942.252

BAB IV.
PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi penyusunan kebijakan berbasis bukti berupaya mendukung peningkatan kualitas penyusunan kebijakan Kemenkes, pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang tepat diharapkan Kemenkes dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, produktif, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat BKPK, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT Sekretariat BKPK Tahun 2024 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT Sekretariat BKPK tahun 2024 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

LAMPIRAN I.
RENJA KL TAHUN 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran								40.766,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga								67.266,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat								35.420,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu								30.240,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala								17.100,0
	716 - Optimalisasi PNBP Eselon I										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								0,0
	717 - Optimalisasi PNBP Satker UPT										515.168,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komerling Ulu								23.567,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran								29.681,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								53.631,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								141.431,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga								231.893,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu								11.400,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala								23.565,0
	719 - Penyelenggaraan SPIP										182.529,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								182.529,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								006 - Anggaran Kesehatan		338.113,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								12.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga								26.340,0
Total											194.260.122,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				194.260.122,0				215.875.508,0	215.875.508,0	215.875.508,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		2.799.832,0				4.510.024,0	4.510.024,0	4.510.024,0
01.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	16	Unit		2.799.832,0	3	3	3	4.510.024,0	4.510.024,0	4.510.024,0
01.CAN.951.701	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Eselon I	8,0	Unit	120.229,1	961.833,0	1,0	1,0	1,0	2.083.544,0	2.083.544,0	2.083.544,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.CAN.951.702	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Unit	163.790,0	163.790,0	1,0	1,0	1,0	163.790,0	163.790,0	163.790,0
01.CAN.951.703	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	3,0	Unit	53.600,0	160.800,0	3,0	3,0	3,0	160.800,0	160.800,0	160.800,0
01.CAN.951.704	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Unit	257.000,0	257.000,0	1,0	1,0	1,0	817.500,0	817.500,0	817.500,0
01.CAN.951.705	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Unit	427.500,0	427.500,0	1,0	1,0	1,0	427.500,0	427.500,0	427.500,0
01.CAN.951.706	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker UPT	6,0	Unit	42.229,8	253.379,0	6,0	6,0	6,0	242.000,0	242.000,0	242.000,0
01.CAN.951.707	Pengadaan Software Eselon I	1,0	Unit	287.154,0	287.154,0	1,0	1,0	1,0	195.000,0	195.000,0	195.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.CAN.951.708	Pengadaan Software Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Unit	20.750,0	20.750,0	1,0	1,0	1,0	150.250,0	150.250,0	150.250,0
01.CAN.951.709	Pengadaan Software Satker UPT	1,0	Unit	197.626,0	197.626,0	1,0	1,0	1,0	110.140,0	110.140,0	110.140,0
01.CAN.951.712	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I	1,0	Unit	70.000,0	70.000,0	1,0	1,0	1,0	159.500,0	159.500,0	159.500,0
01.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit/ Kab/Kota/ Kecamatan/ Titik/Lokasi		776.680,0				776.680,0	776.680,0	776.680,0
01.CBT.971	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit		776.680,0	3	3	3	776.680,0	776.680,0	776.680,0
01.CBT.971.701	Pengadaan Data Center Eselon I	1,0	Unit	6.480,0	6.480,0	1,0	1,0	1,0	6.480,0	6.480,0	6.480,0
01.CBT.971.702	Pengadaan Sistem Keamanan Eselon I	1,0	Unit	255.200,0	255.200,0	1,0	1,0	1,0	255.200,0	255.200,0	255.200,0
01.CBT.971.703	Pemeliharaan Prasarana TIK Eselon 1	1,0	Unit	515.000,0	515.000,0	1,0	1,0	1,0	515.000,0	515.000,0	515.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		165.868.548,0				170.485.081,0	170.485.081,0	170.485.081,0
01.EBA.956	Layanan BMN	15	Layanan		1.662.523,0	15	15	15	2.611.681,0	2.611.681,0	2.611.681,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.956.701	Pengelolaan BMN Eselon I	1,0	Laporan	467.272,0	467.272,0	1,0	1,0	1,0	1.039.037,0	1.039.037,0	1.039.037,0
01.EBA.956.702	Pengelolaan BMN Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	118.440,0	118.440,0	1,0	1,0	1,0	118.440,0	118.440,0	118.440,0
01.EBA.956.703	Pengelolaan BMN Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Laporan	59.714,0	59.714,0	1,0	1,0	1,0	59.714,0	59.714,0	59.714,0
01.EBA.956.704	Pengelolaan BMN Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Laporan	248.583,0	248.583,0	1,0	1,0	1,0	363.178,0	363.178,0	363.178,0
01.EBA.956.705	Pengelolaan BMN Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Laporan	45.958,0	45.958,0	1,0	1,0	1,0	45.958,0	45.958,0	45.958,0
01.EBA.956.706	Pengelolaan BMN Satker UPT	9,0	Laporan	33.226,3	299.037,0	9,0	9,0	9,0	355.998,0	355.998,0	355.998,0
01.EBA.956.707	Pengelolaan Layanan Pengadaan/Jasa Eselon I	1,0	Laporan	167.614,0	167.614,0	1,0	1,0	1,0	370.251,0	370.251,0	370.251,0
01.EBA.956.708	Pengelolaan Layanan Pengadaan/Jasa Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	25.213,0	25.213,0	1,0	1,0	1,0	25.213,0	25.213,0	25.213,0
01.EBA.956.712	Pengelolaan Layanan Pengadaan/Jasa Satker UPT	8,0	Laporan	28.836,5	230.692,0	8,0	8,0	8,0	233.892,0	233.892,0	233.892,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		977.498,0	1	1	1	1.388.024,0	1.388.024,0	1.388.024,0
01.EBA.957.701	Pelaksanaan Layanan Penyusunan Regulasi	1,0	Layanan	244.350,0	244.350,0	1,0	1,0	1,0	423.000,0	423.000,0	423.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.957.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama (MOU/PKS)	1,0	Layanan	11.500,0	11.500,0	1,0	1,0	1,0	33.050,0	33.050,0	33.050,0
01.EBA.957.703	Bimtek Hukum	1,0	Laporan	84.050,0	84.050,0	1,0	1,0	1,0	138.494,0	138.494,0	138.494,0
01.EBA.957.704	Layanan Kekayaan Intelektual	1,0	Layanan	1.826,0	1.826,0	1,0	1,0	1,0	27.810,0	27.810,0	27.810,0
01.EBA.957.705	Layanan Tim Penelaah Perjanjian Alih Material (MTA)	1,0	Layanan	239.990,0	239.990,0	1,0	1,0	1,0	244.340,0	244.340,0	244.340,0
01.EBA.957.706	Layanan Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional	1,0	Layanan	395.782,0	395.782,0	1,0	1,0	1,0	521.330,0	521.330,0	521.330,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	14	Layanan		3.628.928,0	14	14	14	7.789.400,0	7.789.400,0	7.789.400,0
01.EBA.958.701	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Eselon I	1,0	Laporan	103.500,0	103.500,0	1,0	1,0	1,0	560.748,0	560.748,0	560.748,0
01.EBA.958.702	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	39.772,0	39.772,0	1,0	1,0	1,0	39.772,0	39.772,0	39.772,0
01.EBA.958.703	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Laporan	58.604,0	58.604,0	1,0	1,0	1,0	58.604,0	58.604,0	58.604,0
01.EBA.958.707	Pengelolaan hubungan Masyarakat Eselon I	1,0	Laporan	1.314.297,0	1.314.297,0	1,0	1,0	1,0	2.811.180,0	2.811.180,0	2.811.180,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.958.708	Pengelolaan hubungan Masyarakat Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	30.698,0	30.698,0	1,0	1,0	1,0	30.698,0	30.698,0	30.698,0
01.EBA.958.711	Pengelolaan hubungan Masyarakat Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Laporan	19.802,0	19.802,0	1,0	1,0	1,0	19.802,0	19.802,0	19.802,0
01.EBA.958.712	Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT	10,0	Laporan	66.799,5	667.995,0	10,0	10,0	10,0	819.975,0	819.975,0	819.975,0
01.EBA.958.713	Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Eselon I	1,0	Laporan	1.131.550,0	1.131.550,0	1,0	1,0	1,0	3.016.698,0	3.016.698,0	3.016.698,0
01.EBA.958.718	Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Satker UPT	7,0	Laporan	37.530,0	262.710,0	7,0	7,0	7,0	431.923,0	431.923,0	431.923,0
01.EBA.959	Layanan Protokol	1	Layanan		2.957.744,0	1	1	1	3.017.184,0	3.017.184,0	3.017.184,0
01.EBA.959.701	Layanan Protokol	1,0	Laporan	1.021.471,0	1.021.471,0	1,0	1,0	1,0	1.080.911,0	1.080.911,0	1.080.911,0
01.EBA.959.702	Layanan Pimpinan	1,0	Laporan	1.936.273,0	1.936.273,0	1,0	1,0	1,0	1.936.273,0	1.936.273,0	1.936.273,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan		942.646,0	6	6	6	1.499.128,0	1.499.128,0	1.499.128,0
01.EBA.960.701	Penataan TataLaksana Eselon I	1,0	Laporan	100.824,0	100.824,0	1,0	1,0	1,0	310.266,0	310.266,0	310.266,0
01.EBA.960.702	Penataan TataLaksana Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	9.484,0	9.484,0	1,0	1,0	1,0	9.484,0	9.484,0	9.484,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.960.703	Penataan TataLaksana Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Laporan	411.644,0	411.644,0	1,0	1,0	1,0	411.644,0	411.644,0	411.644,0
01.EBA.960.704	Penataan TataLaksana Satker UPT	3,0	Laporan	31.989,3	95.968,0	3,0	3,0	3,0	95.968,0	95.968,0	95.968,0
01.EBA.960.705	Penataan Organisasi	1,0	Laporan	324.726,0	324.726,0	1,0	1,0	1,0	671.766,0	671.766,0	671.766,0
01.EBA.962	Layanan Umum	12	Layanan		879.217,0	12	12	12	1.115.963,0	1.115.963,0	1.115.963,0
01.EBA.962.701	Pengelolaan Tata Persuratan Eselon I	1,0	Laporan	67.234,0	67.234,0	1,0	1,0	1,0	145.816,0	145.816,0	145.816,0
01.EBA.962.702	Pengelolaan Tata Persuratan Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	14.520,0	14.520,0	1,0	1,0	1,0	14.520,0	14.520,0	14.520,0
01.EBA.962.703	Pengelolaan Tata Persuratan Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Laporan	32.304,0	32.304,0	1,0	1,0	1,0	32.304,0	32.304,0	32.304,0
01.EBA.962.705	Pengelolaan Tata Persuratan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Laporan	3.640,0	3.640,0	1,0	1,0	1,0	3.640,0	3.640,0	3.640,0
01.EBA.962.706	Pengelolaan Tata Persuratan Satker UPT	2,0	Laporan	17.967,0	35.934,0	2,0	2,0	2,0	34.497,0	34.497,0	34.497,0
01.EBA.962.707	Pengelolaan Kerumahtanggaan Eselon I	1,0	Laporan	370.122,0	370.122,0	1,0	1,0	1,0	438.864,0	438.864,0	438.864,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.962.708	Pengelolaan Kerumahtanggaan Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	15.240,0	15.240,0	1,0	1,0	1,0	15.240,0	15.240,0	15.240,0
01.EBA.962.709	Pengelolaan Kerumahtanggaan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Laporan	90.960,0	90.960,0	1,0	1,0	1,0	90.960,0	90.960,0	90.960,0
01.EBA.962.710	Pengelolaan Kerumahtanggaan Satker UPT	8,0	Laporan	31.157,9	249.263,0	8,0	8,0	8,0	340.122,0	340.122,0	340.122,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	8	Layanan		508.464,0	8	8	8	835.957,0	835.957,0	835.957,0
01.EBA.963.701	Pengorganisasian dan Pengelolaan Data	1,0	Laporan	207.703,0	207.703,0	1,0	1,0	1,0	240.016,0	240.016,0	240.016,0
01.EBA.963.702	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Eselon I	1,0	Laporan	153.469,0	153.469,0	1,0	1,0	1,0	340.322,0	340.322,0	340.322,0
01.EBA.963.703	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Laporan	35.122,0	35.122,0	1,0	1,0	1,0	35.122,0	35.122,0	35.122,0
01.EBA.963.704	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Laporan	20.736,0	20.736,0	1,0	1,0	1,0	20.736,0	20.736,0	20.736,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBA.963.705	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Laporan	20.824,0	20.824,0	1,0	1,0	1,0	20.824,0	20.824,0	20.824,0
01.EBA.963.706	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Satker UPT	4,0	Laporan	17.652,5	70.610,0	4,0	4,0	4,0	178.937,0	178.937,0	178.937,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		352.634,0	1	1	1	776.340,0	776.340,0	776.340,0
01.EBA.969.701	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1,0	Laporan	261.134,0	261.134,0	1,0	1,0	1,0	610.590,0	610.590,0	610.590,0
01.EBA.969.702	Layanan Unit Pengendalian Gratifikasi	1,0	Layanan	91.500,0	91.500,0	1,0	1,0	1,0	165.750,0	165.750,0	165.750,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	15	Layanan		153.958.894,0	15	15	15	151.451.404,0	151.451.404,0	151.451.404,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	11,0	Layanan	5.882.897,7	64.711.875,0	11,0	11,0	11,0	62.204.385,0	62.204.385,0	62.204.385,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15,0	Layanan	5.949.801,3	89.247.019,0	15,0	15,0	15,0	89.247.019,0	89.247.019,0	89.247.019,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		8.658.706,0				18.105.484,0	18.105.484,0	18.105.484,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	202	Unit		5.661.406,0	9	9	9	10.784.938,0	10.784.938,0	10.784.938,0
01.EBB.951.701	Pengadaan Kendaraan Bermotor Eselon 1	2,0	unit	595.801,0	1.191.602,0	1,0	1,0	1,0	1.191.602,0	1.191.602,0	1.191.602,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBB.951.702	Pengadaan Kendaraan Bermotor Pusjak Upaya Kesehatan	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.706	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Eselon I	150,0	Unit	18.967,5	2.845.128,0	1,0	1,0	1,0	7.968.660,0	7.968.660,0	7.968.660,0
01.EBB.951.709	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	unit	172.484,0	172.484,0	1,0	1,0	1,0	172.484,0	172.484,0	172.484,0
01.EBB.951.713	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Satker UPT	52,0	Unit	27.926,8	1.452.192,0	8,0	8,0	8,0	1.452.192,0	1.452.192,0	1.452.192,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	3	Unit		2.997.300,0	3	3	3	7.320.546,0	7.320.546,0	7.320.546,0
01.EBB.971.701	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Eselon I	1,0	unit	2.622.300,0	2.622.300,0	1,0	1,0	1,0	6.070.546,0	6.070.546,0	6.070.546,0
01.EBB.971.706	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Satker UPT	2,0	Unit	187.500,0	375.000,0	2,0	2,0	2,0	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		7.063.414,0				9.421.858,0	9.421.858,0	9.421.858,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1022	Orang		7.063.414,0	439	439	439	9.421.858,0	9.421.858,0	9.421.858,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBC.954.701	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I	1,0	Orang	552.305,0	552.305,0	1,0	1,0	1,0	552.300,0	552.300,0	552.300,0
01.EBC.954.702	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Orang	72.617,0	72.617,0	1,0	1,0	1,0	72.617,0	72.617,0	72.617,0
01.EBC.954.705	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Orang	164.324,0	164.324,0	1,0	1,0	1,0	164.324,0	164.324,0	164.324,0
01.EBC.954.706	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Satker UPT	4,0	Orang	34.320,5	137.282,0	4,0	4,0	4,0	81.432,0	81.432,0	81.432,0
01.EBC.954.707	Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I	1,0	Orang	1.897.822,0	1.897.822,0	1,0	1,0	1,0	2.589.922,0	2.589.922,0	2.589.922,0
01.EBC.954.708	Pengembangan Kompetensi SDM Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Orang	74.739,0	74.739,0	1,0	1,0	1,0	74.739,0	74.739,0	74.739,0
01.EBC.954.709	Pengembangan Kompetensi SDM Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Orang	115.812,0	115.812,0	1,0	1,0	1,0	115.812,0	115.812,0	115.812,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBC.954.710	Pengembangan Kompetensi SDM Pusjak Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Orang	171.100,0	171.100,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBC.954.711	Pengembangan Kompetensi SDM Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Orang	62.736,0	62.736,0	1,0	1,0	1,0	62.736,0	62.736,0	62.736,0
01.EBC.954.712	Pengembangan Kompetensi SDM Satker UPT	8,0	Orang	143.129,8	1.145.038,0	8,0	8,0	8,0	2.736.745,0	2.736.745,0	2.736.745,0
01.EBC.954.713	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I	1,0	Orang	1.100.085,0	1.100.085,0	1,0	1,0	1,0	870.735,0	870.735,0	870.735,0
01.EBC.954.714	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Orang	174.187,0	174.187,0	1,0	1,0	1,0	174.187,0	174.187,0	174.187,0
01.EBC.954.715	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Orang	352.172,0	352.172,0	1,0	1,0	1,0	352.172,0	352.172,0	352.172,0
01.EBC.954.716	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Orang	156.300,0	156.300,0	1,0	1,0	1,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.EBC.954.718	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Satker UPT	10,0	Orang	88.689,5	886.895,0	10,0	10,0	10,0	1.074.137,0	1.074.137,0	1.074.137,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		9.092.942,0				12.576.381,0	12.576.381,0	12.576.381,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11	Dokumen		3.900.787,0	11	10	10	6.851.091,0	6.851.091,0	6.851.091,0
01.EBD.952.701	Penyusunan Perencanaan Eselon 1	1,0	Dokumen	779.645,0	779.645,0	1,0	1,0	1,0	1.230.515,0	1.230.515,0	1.230.515,0
01.EBD.952.702	Penyusunan Perencanaan Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Dokumen	445.220,0	445.220,0	1,0	1,0	1,0	445.220,0	445.220,0	445.220,0
01.EBD.952.703	Penyusunan Perencanaan Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Dokumen	394.574,0	394.574,0	1,0	1,0	1,0	394.574,0	394.574,0	394.574,0
01.EBD.952.704	Penyusunan Perencanaan Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Dokumen	136.300,0	136.300,0	1,0	1,0	1,0	150.689,0	150.689,0	150.689,0
01.EBD.952.705	Penyusunan Perencanaan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	63.822,0	63.822,0	1,0	1,0	1,0	63.822,0	63.822,0	63.822,0
01.EBD.952.706	Penyusunan Perencanaan Satker UPT	7,0	Dokumen	55.600,4	389.203,0	7,0	7,0	6,0	1.107.929,0	1.107.929,0	1.107.929,0
01.EBD.952.707	Penyusunan Anggaran Eselon I	1,0	Dokumen	985.603,0	985.603,0	1,0	1,0	1,0	2.687.902,0	2.687.902,0	2.687.902,0
01.EBD.952.708	Penyusunan Anggaran Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Dokumen	35.220,0	35.220,0	1,0	1,0	1,0	35.220,0	35.220,0	35.220,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBD.952.709	Penyusunan Anggaran Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Dokumen	98.180,0	98.180,0	1,0	1,0	1,0	98.180,0	98.180,0	98.180,0
01.EBD.952.711	Penyusunan Anggaran Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	81.608,0	81.608,0	1,0	1,0	1,0	81.608,0	81.608,0	81.608,0
01.EBD.952.712	Penyusunan Anggaran Satker UPT	8,0	Dokumen	61.426,5	491.412,0	8,0	8,0	7,0	555.432,0	555.432,0	555.432,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15	Dokumen		1.698.178,0	15	15	15	579.565,0	579.565,0	579.565,0
01.EBD.953.701	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Eselon I	1,0	Dokumen	804.421,0	804.421,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.702	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Dokumen	131.027,0	131.027,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.703	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Dokumen	115.384,0	115.384,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.704	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Dokumen	84.380,0	84.380,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBD.953.705	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	132.092,0	132.092,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.706	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satker UPT	10,0	Dokumen	43.087,4	430.874,0	10,0	10,0	10,0	579.565,0	579.565,0	579.565,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	15	Dokumen		2.684.825,0	15	15	15	3.944.402,0	3.944.402,0	3.944.402,0
01.EBD.955.701	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I	1,0	Dokumen	640.458,0	640.458,0	1,0	1,0	1,0	1.019.731,0	1.019.731,0	1.019.731,0
01.EBD.955.702	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Dokumen	84.650,0	84.650,0	1,0	1,0	1,0	84.650,0	84.650,0	84.650,0
01.EBD.955.703	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	1,0	Dokumen	151.793,0	151.793,0	1,0	1,0	1,0	151.793,0	151.793,0	151.793,0
01.EBD.955.704	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	1,0	Dokumen	35.300,0	35.300,0	1,0	1,0	1,0	43.300,0	43.300,0	43.300,0
01.EBD.955.705	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	78.612,0	78.612,0	1,0	1,0	1,0	78.612,0	78.612,0	78.612,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.EBD.955.706	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satker UPT	9,0	Dokumen	53.708,0	483.372,0	9,0	9,0	9,0	564.375,0	564.375,0	564.375,0
01.EBD.955.707	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR Eselon I	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.708	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	55.767,0	55.767,0	1,0	1,0	1,0	55.767,0	55.767,0	55.767,0
01.EBD.955.710	Penyusunan Dokumen PNB	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.711	Pengelolaan Perbendaharaan Eselon I	1,0	Dokumen	193.629,0	193.629,0	1,0	1,0	1,0	365.337,0	365.337,0	365.337,0
01.EBD.955.712	Pengelolaan Perbendaharaan Pusjak Upaya Kesehatan	1,0	Dokumen	19.570,0	19.570,0	1,0	1,0	1,0	19.570,0	19.570,0	19.570,0
01.EBD.955.714	Pengelolaan Perbendaharaan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1,0	Dokumen	32.900,0	32.900,0	1,0	1,0	1,0	32.900,0	32.900,0	32.900,0
01.EBD.955.715	Pengelolaan Perbendaharaan Satker UPT	5,0	Dokumen	42.215,4	211.077,0	5,0	5,0	6,0	165.572,0	165.572,0	165.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.955.715	Pengelolaan Perbendaharaan Satker UPT	Utama	211.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211.077,0
01.EBD.955.716	Optimalisasi PNBP Eselon I	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.717	Optimalisasi PNBP Satker UPT	Utama	0,0	515.168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515.168,0
01.EBD.955.718	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Satker UPT	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.719	Penyelenggaraan SPIP	Utama	182.529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182.529,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		338.113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.113,0
01.EBD.961.701	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Eselon I	Utama	223.329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223.329,0
01.EBD.961.702	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Pusjak Upaya Kesehatan	Utama	17.014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.014,0
01.EBD.961.703	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Satker UPT	Utama	97.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.770,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		471.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471.039,0
01.EBD.974.701	Penatausahaan Kearsipan Eselon 1	Utama	127.852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.852,0
01.EBD.974.702	Penatausahaan Kearsipan Pusjak Upaya Kesehatan	Utama	37.988,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.988,0
01.EBD.974.703	Penatausahaan Kearsipan Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK	Utama	31.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.480,0
01.EBD.974.705	Penatausahaan Kearsipan Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Utama	19.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.404,0
01.EBD.974.706	Penatausahaan Kearsipan Satker UPT	Utama	149.702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.702,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.974.707	Sarana Arsip Eselon 1	Utama	11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.200,0
01.EBD.974.708	Sarana Arsip Pusjak Upaya Kesehatan	Utama	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.EBD.974.711	Sarana Arsip Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Utama	36.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.973,0
01.EBD.974.712	Sarana Arsip Satker UPT	Utama	38.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.440,0
Total			193.744.954,0	515.168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194.260.122,0

Jakarta, 03 Mei 2023

Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Dr. Nana Mulyana
NIP. 196505211985011001

LAMPIRAN II.
DIPA BKPK TAHUN 2024



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



DS:3072-2592-6163-4006

NOMOR : SP DIPA- 024.11.1.416151/2024

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
- Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- Sebesar : Rp. 462.942.252.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	462.942.252.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 462.942.252.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttt.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



DS:3072-2592-6163-4006

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024

Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	17.000.082.000
DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp.	17.000.082.000
DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	364.136.251.000
DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	Rp.	254.893.640.000
DS.6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	17.705.800.000
DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp.	11.372.825.000
DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Rp.	61.238.950.000
DS.6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Rp.	18.925.036.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	81.805.919.000
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	81.805.919.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		17.000.082.000
Kegiatan	: 6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		17.000.082.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan		
	: 2. 02	Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN		
	: 3. 03	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account / District Health Account (PHA/DHA)		
	: 4. 04	Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni		
	: 5. 05	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan		
	: 6. 06	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas		
	: 7. 07	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6804.AEA	Koordinasi	8,00 kegiatan	9.583.051.000
Rincian Output	: 01	AEA.001 Koordinasi Pengembangan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19)	2,00 kegiatan	3.030.800.000
	: 02	AEA.002 Pengembangan Grouper INA CBG (PK-33)	1,00 kegiatan	930.540.000
	: 03	AEA.003 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	1,00 kegiatan	361.870.000
	: 04	AEA.004 Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	1,00 kegiatan	443.000.000
	: 05	AEA.005 Fasilitas Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1,00 kegiatan	1.184.891.000
	: 06	AEA.006 Konsolidasi Penyusunan National Health Account (PK-17)	1,00 kegiatan	1.741.980.000
	: 07	AEA.007 Penguatan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)	1,00 kegiatan	1.889.970.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.500,00 orang	2.186.420.000
Rincian Output	: 01	AEF.001 Advokasi Pembiayaan Kesehatan kepada Daerah untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	1500,00 orang	2.186.420.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 3	: 6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	300,00 Orang, Kegiatan	4.990.611.000
Rincian Output	: 01	DCM.001 Pelatihan Koding bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program JKN (PK-33)	300,00 Orang	4.990.611.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Rekomendasi	240.000.000
Rincian Output	: 01	FAE.001 Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1,00 Laporan	240.000.000
Program	: 024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		364.136.251.000
Kegiatan	: 6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan		254.893.640.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 2. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 3. 03	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 4. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan		
	: 5. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	12,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.188.715.000
Rincian Output	: 01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Layanan Primer (LP-1)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 02	ABG.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Labkesmas (LP-2)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 03	ABG.003 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Jejaring Layanan Rujukan (LR-11)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 04	ABG.004 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Transformasi RS Vertikal (LR-12)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 05	ABG.005 Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting (LP-4)	2,00 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000
	: 06	ABG.006 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Imunisasi (LP-5)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 07	ABG.007 Rekomendasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP-9)	2,00 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 3

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian				
08	ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Promosi Kesehatan dan PTM (LP-10)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000	
09	ABG.009	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.588.715.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	6833.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	10.367.257.000
Rincian Output	01	AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1,00	kegiatan	3.367.257.000
	02	AEA.002	Manajemen Persiapan Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) (LP-4)	1,00	kegiatan	7.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	234.337.668.000
Rincian Output	01	PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	210.762.930.000
	02	PBG.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 Melalui Uji Klinik Vaksin Merah Putih (Inavac) (RF-14)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.574.738.000
Kegiatan	6834		Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			17.705.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01		Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	2. 02		Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	3. 03		Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	4. 04		Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
	5. 05		Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	4	6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	11,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.914.310.000
Rincian Output	01	ABG.001	Rekomendasi kebijakan pemenuhan kebutuhan 40 obat esensial produksi dalam negeri (RF-13)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 4

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian				
02	ABG.002	Rekomendasi kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Alat Kesehatan (RF -15)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	
03	ABG.003	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan 14 antigen vaksin (RF -14)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000	
04	ABG.005	Rekomendasi Kebijakan terkait Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	569.170.000	
05	ABG.006	Rekomendasi Kebijakan Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Medis (SDM-21)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	635.830.000	
06	ABG.007	Rekomendasi Kebijakan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM 23)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	609.310.000	
07	ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Biorepository dalam kesiapsiagaan terhadap ancaman bioterorisme (LP 2)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
08	ABG.009	Rekomendasi Kebijakan Implementasi International Health Regulation (IHR) dalam kesiapsiagaan penyakit berpotensi wabah dan pandemi (LP-2)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
09	ABG.011	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (LP-2)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	4.300.000.000	
10	ABG.031	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000	
11	ABG.032	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Alat Kesehatan (RF-15)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	5	6834.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	3.791.490.000
Rincian Output	01	AEA.002	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1,00	kegiatan	3.791.490.000
Klasifikasi Rincian Output	6	6834.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,00	Paket, Unit	2.000.000.000
Rincian Output	01	CAB.002	Penyelenggaraan Biomedical Genome Based Science Initiative (BGSi)	1,00	Paket	2.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



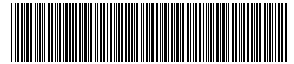
DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 5

Kegiatan	: 6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan			11.372.825.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)			
	: 2. 01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 3. 02	Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi			
	: 4. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 5. 03	Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya			
	: 6. 03	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 7. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan			
	: 8. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	7	: 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.707.323.000
Rincian Output	: 01	ABG.003 Rekomendasi Kebijakan Dewan Pertimbangan Klinis	1,00	Rekomendasi Kebijakan	550.000.000
	: 02	ABG.004 Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat JKN (PK-18)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.077.750.000
	: 03	ABG.009 Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah (PK-20)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.079.573.000
Klasifikasi Rincian Output	8	: 6835.AEA Koordinasi	2,00	kegiatan	4.568.608.000
Rincian Output	: 01	AEA.001 Integrasi dan Sinergi dalam rangka Pencapaian Pembangunan Kesehatan	1,00	kegiatan	2.635.638.000
	: 02	AEA.002 Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan dan Penguatan Sistem Kesehatan (PK-20)	1,00	kegiatan	1.932.970.000
Klasifikasi Rincian Output	9	: 6835.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.096.894.000
Rincian Output	: 01	PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	558.508.000
	: 02	PBG.002 Rekomendasi Kebijakan Penyusunan National Health Account (NHA) (PK-17)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	186.810.000
	: 03	PBG.003 Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	665.432.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 6

		Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
		Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	
	: 04	PBG.004 Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK-18) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.680.000
	: 05	PBG.005 Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK-18) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.985.464.000
Kegiatan	: 6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			61.238.950.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 2. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 3. 03	Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 4. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			
	: 5. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan			
	: 6. 06	Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga			
	: 7. 07	Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	10	: 6836.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	19,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.697.080.000
Rincian Output	: 01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Implementasi Kesepakatan/Kebijakan/Inisiatif Kesehatan Global yang Mendukung Transformasi Kesehatan Nasional (HS-32)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	837.990.000
	: 02	ABG.009 Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) di Fasyankes (TK 31)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	429.450.000
	: 03	ABG.017 Rekomendasi Kebijakan Perkembangan Nutrigenomic di Indonesia (TK 25)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	391.990.000
	: 04	ABG.019 Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Bilateral Sektor Barang dan Jasa Bidang Kesehatan (RF 15)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	388.080.000
	: 05	ABG.022 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama Regional untuk Transformasi Kesehatan (HS 29)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	408.180.000
	: 06	ABG.023 Rekomendasi Kebijakan Operasionalisasi ACPHEED dan ABVC	1,00	Rekomendasi Kebijakan	428.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 7

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
	di Indonesia (HS 32)	1.00	Rekomendasi Kebijakan
07	ABG.024 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (HS 31)	1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.307.100.000
08	ABG.025 Rekomendasi kebijakan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (HS 32)	3.00	Rekomendasi Kebijakan 1.155.210.000
09	ABG.026 Rekomendasi kebijakan Evaluasi implementasi platform Satu Sehat (TK 31)	2.00	Rekomendasi Kebijakan 926.500.000
10	ABG.027 Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelaksanaan Teknologi WGS di Rumah Sakit (TK 25)	2.00	Rekomendasi Kebijakan 818.540.000
11	ABG.028 Rekomendasi Kebijakan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Teknologi Vaccine Therapeutic dan Dignostic (VTD) dan fraksionasi plasma di Indonesia (RF 14)	2.00	Rekomendasi Kebijakan 801.340.000
12	ABG.029 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan kerja sama bilateral untuk peningkatan layanan kesehatan dan inovasi (LR-12)	2.00	Rekomendasi Kebijakan 804.420.000
Klasifikasi Rincian Output	11 : 6836.AEA Koordinasi	1.00	kegiatan 1.555.250.000
Rincian Output	: 01 AEA.001 Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1.00	kegiatan 1.555.250.000
Klasifikasi Rincian Output	12 : 6836.AEC Kerja sama	25.00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan 33.747.286.000
Rincian Output	: 01 AEC.003 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	3.00	Dokumen 884.510.000
	02 AEC.005 Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS-32)	2.00	Dokumen 863.760.000
	03 AEC.006 Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK-25)	2.00	Dokumen 1.952.340.000
	04 AEC.007 Blueprint Pengelolaan Kerja sama Internasional (HS-32)	1.00	Dokumen 856.052.000
	05 AEC.008 Jejaring Internasional Health Resiliency Rapid Response and Recovery Kedaruratan Kesehatan (HS-32)	10.00	Kesepakatan 1.718.513.000
	06 AEC.009 Dokumen Kerjasama Kesehatan Global dan Teknologi Terkait Biomedical Genome Science Initiative (TK 25)	1.00	Dokumen 1.220.631.000
	07 AEC.011 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan	2.00	Dokumen 904.980.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 8

Kerja sama		Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	
	(RF-14)	2.00	Dokumen
08	AEC.012 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF-14)	2.00	Dokumen 846.500.000
09	AEC.013 Operasionalisasi ACPHEED (HS29)	1.00	Kegiatan 9.000.000.000
10	AEC.014 Kontribusi Indonesia (HS 32)	1.00	Kegiatan 15.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13 : 6836.AEG Konferensi dan Event	6.00	Kegiatan, Paket Kegiatan 16.309.598.000
Rincian Output	: 01 AEG.001 Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	2.00	Kegiatan 8.913.258.000
	02 AEG.002 Pertemuan Joint Working Group (HS 32)	1.00	Kegiatan 1.736.360.000
	03 AEG.003 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	3.00	Kegiatan 5.659.980.000
Klasifikasi Rincian Output	14 : 6836.AEH Promosi	1.00	promosi, Kegiatan 929.736.000
Rincian Output	: 01 AEH.001 Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF 15)	1.00	Kegiatan 929.736.000
Kegiatan	: 6837 Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan		18.925.036.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01 Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman		
Klasifikasi Rincian Output	15 : 6837.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 13.149.833.000
Rincian Output	: 01 ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan 13.149.833.000
Klasifikasi Rincian Output	16 : 6837.AEA Koordinasi	2.00	kegiatan 5.775.203.000
Rincian Output	: 01 AEA.001 Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1.00	kegiatan 3.029.743.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 9

Koordinasi		kegiatan			
02	AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.00	kegiatan	2.745.460.000
Program	: 024.11.WA	Program Dukungan Manajemen			81.805.919.000
Kegiatan	: 6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			81.805.919.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
	: 2. 02	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	22,00	Unit	2.195.407.000
Rincian Output	: 01 CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	22,00	Unit	2.195.407.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 6797.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	770.200.000
Rincian Output	: 01 CBT.971	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	770.200.000
Klasifikasi Rincian Output	3 : 6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	61.008.467.000
Rincian Output	: 01 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	1.058.686.000
	: 02 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	977.498.000
	: 03 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5,00	Layanan	2.676.662.000
	: 04 EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	2.957.744.000
	: 05 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	841.816.000
	: 06 EBA.962	Layanan Umum	4,00	Layanan	931.087.000
	: 07 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	541.010.000
	: 08 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	352.634.000
	: 09 EBA.994	Layanan Perkantoran	5,00	Layanan	50.671.330.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 10

Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
Klasifikasi Rincian Output	4 : 6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23,00	Unit, m2, Paket	6.850.830.000
Rincian Output	: 01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	22,00	Unit	4.228.530.000
	: 02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	2.622.300.000
Klasifikasi Rincian Output	5 : 6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	680,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	4.948.429.000
Rincian Output	: 01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	680,00	Orang	4.948.429.000
Klasifikasi Rincian Output	6 : 6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	51,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi, Dokumen	6.032.586.000
Rincian Output	: 01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11,00	Dokumen	2.976.097.000
	: 02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11,00	Dokumen	1.158.730.000
	: 03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	18,00	Dokumen	1.420.796.000
	: 04 EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2,00	Dokumen	238.901.000
	: 05 EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9,00	Dokumen	238.062.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA-024.11.1.416151/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	462.942.252.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	462.942.252.000	(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNB	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA-024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-	454.091.842	8.850.410	-	-	462.942.252		
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	17.000.082	-	-	-	17.000.082		
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	17.000.082	-	-	-	17.000.082		
6804.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.583.051	-	-	-	9.583.051	01.51	
01	RM	-	9.583.051	-	-	-	9.583.051	182	
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.186.420	-	-	-	2.186.420	01.51	
01	RM	-	2.186.420	-	-	-	2.186.420	182@	
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.990.611	-	-	-	4.990.611	01.51	
01	RM	-	4.990.611	-	-	-	4.990.611	182@	
6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.000	-	-	-	240.000	01.51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	240.000	-	-	-	240.000	182	
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	363.676.251	460.000	-	-	364.136.251		
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	-	254.433.640	460.000	-	-	254.893.640		
6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.188.715	-	-	-	10.188.715	01.51	
01 RM		-	10.188.715	-	-	-	10.188.715	182	
6833.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.367.257	-	-	-	10.367.257	01.51	
01 RM		-	10.367.257	-	-	-	10.367.257	182@	
6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	233.877.668	460.000	-	-	234.337.668	01.51	
01 RM		-	233.877.668	460.000	-	-	234.337.668	182@	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	17.705.800	-	-	-	17.705.800		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.914.310	-	-	-	11.914.310	01.51	
01 RM		-	11.914.310	-	-	-	11.914.310	182@	
6834.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.791.490	-	-	-	3.791.490	01.51	
01 RM		-	3.791.490	-	-	-	3.791.490	182	
6834.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01.51	
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	182	
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	-	11.372.825	-	-	-	11.372.825		
6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.707.323	-	-	-	2.707.323	01.51	
01 RM		-	2.707.323	-	-	-	2.707.323	182	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6835.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.568.608	-	-	-	4.568.608	01.51	
01	RM	-	4.568.608	-	-	-	4.568.608	182@	
6835.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.096.894	-	-	-	4.096.894	01.51	
01	RM	-	4.096.894	-	-	-	4.096.894	182	
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	-	61.238.950	-	-	-	61.238.950		
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.697.080	-	-	-	8.697.080	01.51	
01	RM	-	8.697.080	-	-	-	8.697.080	182	
6836.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.555.250	-	-	-	1.555.250	01.51	
01	RM	-	1.555.250	-	-	-	1.555.250	182	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6836.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	33.747.286	-	-	-	33.747.286	01.51	
01	RM	-	33.747.286	-	-	-	33.747.286	182@	
6836.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	16.309.598	-	-	-	16.309.598	01.51	
01	RM	-	16.309.598	-	-	-	16.309.598	182	
6836.AEH	Promosi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	929.736	-	-	-	929.736	01.51	
01	RM	-	929.736	-	-	-	929.736	182	
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	-	18.925.036	-	-	-	18.925.036		
6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.149.833	-	-	-	13.149.833	01.51	
01	RM	-	13.149.833	-	-	-	13.149.833	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA-024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6837.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.775.203	-	-	-	5.775.203	01.51	
01	RM	-	5.775.203	-	-	-	5.775.203	182	
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	73.415.509	8.390.410	-	-	81.805.919		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	73.415.509	8.390.410	-	-	81.805.919		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	543.586	1.651.821	-	-	2.195.407	01.51	
01	RM	-	543.586	1.651.821	-	-	2.195.407	182	
6797.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	770.200	-	-	-	770.200	01.51	
01	RM	-	770.200	-	-	-	770.200	182	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	60.955.967	52.500	-	-	61.008.467	01.51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA-024.11.1.416151/2024

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	60.955.967	52.500	-	-	61.008.467	182@	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	164.741	6.686.089	-	-	6.850.830	01.51	
01	RM	-	164.741	6.686.089	-	-	6.850.830	182	
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.948.429	-	-	-	4.948.429	01.51	
01	RM	-	4.948.429	-	-	-	4.948.429	182	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.032.586	-	-	-	6.032.586	01.51	
01	RM	-	6.032.586	-	-	-	6.032.586	182	
JUMLAH		-	454.091.842	8.850.410	-	-	462.942.252		

Jakarta, 24 November 2023
 a.n. MENTERI KESEHATAN
 SEKRETARIS JENDERAL

ttt.
 Kunta Wibawa Dasa Nugraha
 NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS-3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	11.339.486	14.390.245	19.010.708	21.824.563	22.236.010	18.993.791	46.253.331	104.826.949	72.130.564	21.994.585	22.204.706	87.737.315	462.942.252
		BELANJA BARANG	11.336.486	14.364.077	18.755.997	21.341.728	21.349.711	18.493.173	44.628.699	102.970.095	70.069.419	21.382.974	21.687.892	87.711.591	454.091.842
		BELANJA MODAL	3.000	26.169	254.709	482.835	886.299	500.618	1.624.632	1.856.855	2.061.144	611.611	516.814	25.724	8.850.410
	024.11.DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	18.122	584.194	1.614.230	1.554.835	1.216.779	1.343.648	2.003.422	2.003.097	2.066.288	1.904.918	1.610.548	1.080.001	17.000.082
	024.11.DS.6833	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.122	584.194	1.614.230	1.554.835	1.216.779	1.343.648	2.003.422	2.003.097	2.066.288	1.904.918	1.610.548	1.080.001	17.000.082
		Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	64.317	520.206	3.389.726	5.807.639	5.342.346	2.441.505	25.895.816	84.092.015	51.208.600	3.345.124	4.749.165	68.037.181	254.893.640
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	64.317	520.206	3.350.837	5.386.528	5.342.346	2.441.505	25.895.816	84.092.015	51.208.600	3.345.124	4.749.165	68.037.181	254.433.640
	024.11.DS.6834	53 BELANJA MODAL	0	0	38.889	421.111	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
		Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.416.071	1.418.049	1.424.688	1.435.821	1.454.341	1.474.379	1.496.796	1.503.929	1.464.546	1.469.145	1.476.269	1.671.766	17.705.800
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.416.071	1.418.049	1.424.688	1.435.821	1.454.341	1.474.379	1.496.796	1.503.929	1.464.546	1.469.145	1.476.269	1.671.766	17.705.800
	024.11.DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	22.210	1.033.877	1.093.042	1.131.892	1.156.461	1.156.461	1.072.833	1.074.212	1.016.327	986.446	986.446	642.617	11.372.825
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.210	1.033.877	1.093.042	1.131.892	1.156.461	1.156.461	1.072.833	1.074.212	1.016.327	986.446	986.446	642.617	11.372.825
	024.11.DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.105.136	61.238.950

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS-3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

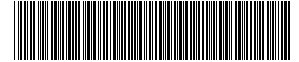
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	024.11.DS.6837	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.105.136	61.238.950
		Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	534.678	703.590	790.817	1.035.027	1.150.242	1.168.655	2.210.607	2.210.289	2.288.777	1.664.062	1.311.924	3.856.367	18.925.036
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	534.678	703.590	790.817	1.035.027	1.150.242	1.168.655	2.210.607	2.210.289	2.288.777	1.664.062	1.311.924	3.856.367	18.925.036
	024.11.WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4.181.014	5.027.255	5.595.129	5.756.273	6.812.767	6.306.069	8.470.782	8.840.333	8.982.952	7.521.816	6.967.281	7.344.247	81.805.919
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.176.014	5.001.097	5.379.309	5.694.546	5.926.469	5.805.450	6.846.150	6.983.476	6.921.808	6.910.205	6.450.467	7.318.523	73.415.500
		53 BELANJA MODAL	3.000	26.169	215.820	61.724	886.299	500.618	1.624.632	1.856.855	2.061.144	611.611	516.814	25.724	8.390.410

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 88.644.108 52 Belanja Barang Rp. 88.644.108		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.400 Pelaksanaan Belanja Honorarium menunggu penambahan anggaran perjalanin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
024.11.DG 6804	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	024.11.DS 6833	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 531.650 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjalanin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6833.AEA	Koordinasi 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.000.000 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjalanin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.675 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.500 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjalanin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.000 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.753 Pelaksanaan Belanja Bahan menunggu penambahan anggaran perjalanin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.050.730 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.200 Pelaksanaan Belanja Sewa menunggu penambahan anggaran perjalanin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.368 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.950

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6836.AEC	Kerja sama 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.500.000 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.244.745 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.109 Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 522131 Belanja Jasa Konsultansi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Tidak sesuai dalam penerapan kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	024.11.WA 6797	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.150.430 Tidak sesuai dalam penerapan kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 361.450 Tidak sesuai SBM 2024 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		
6835.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.348 Alokasi harus dilengkapi dasar justifikasi pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 261.800 Alokasi harus dilengkapi dasar justifikasi pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN		
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 3.889.930		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan kend roda 4 sebanyak 1 unit dan kend roda 6 sebanyak 1 unit Rp. 1.267.630		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan * Rehab Gedung ex P2P phase 2 seluas 4.882 m2 Rp. 2.622.300		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR KONTRIBUTOR

Tim Pengarah:

1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Editor:

1. Project Monitoring Officer (PMO) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Penyusun:

1. Sari Ramadhani
2. Fairuz Wardaty
3. Titin Delia
4. Martin Lasty Marbun

Desain dan Cover

Nowo Setiyo Raharjo





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024**